**INISIASI Ke-3**

**DAHRENDORF vs MARX: Konflik**

Teori konflik Ralf Dahrendorf didasarkan pada anggapan yang menyatakan bahwa semua sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif. Koordinasi yang mengharuskan adanya otoritas merupakan sesuatu yang sangat esensial sebagai suatu yang mendasari semua organisasi sosial. Atas dasar hal tersebut di atas maka dalam suatu sistem sosial mengharuskan adanya otoritas serta relasi-­relasi kekuasaan yang menyangkut pihak-­pihak atasan dan bawahan yang akan menyebabkan timbulnya kelas sehingga ada pembagian yang jelas antara yang berkuasa dengan yang dikuasai.

Teori konflik Ralf Dahrendorf juga membicarakan mengenai intensitas bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Ada dua faktor yang mempengaruhi intensitas, yaitu tingkat keserupaan konflik dan mobilitas. Di sisi lain, teori konflik Ralf Dahrendorf juga membicarakan tentang kekerasan. Dalam hal ini, konsep kekerasan adalah mengacu pada alat yang digunakan oleh pihak­-pihak yang saling bertentangan untuk mengejar kepentingannya. Tingkat kekerasan mempunyai berbagai macam perwujudan dari cara-­cara yang halus sampai pada cara­-cara kasar.

Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konsekuensi atau fungsi konflik dapat mengakibatkan adanya perubahan sosial, yaitu khusus yang berkaitan dengan struktur otoritas (

kekuasaan yang dilegitimasikan). Ada tiga tipe perubahan struktur, yaitu (1) perubahan keseluruhan personil dalam posisi dominasi; (2) perubahan sebagian personil dalam posisi dominasi dan (3) digabungkannya kepentingan-­kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang mendominasi.

Dahrendorf sendiri menyatakan bahwa teorinya itu bersifat berat sebelah karena hanya mampu mendekati sebagian saja dari kenyataan sosial yang seharusnya. Namun, menurut Poloma (1986) dasar dari teori konflik Dahrendorf adalah penolakan dan penerimaan sebagian serta perumusan kembali teori Karl Marx. Menurut Karl Marx kaum borjuis adalah sebagai pemilik dan pengelola sistem kapitalis, sedangkan para pekerja demi kelangsungan hidupnya tergantung pada sistem tersebut.

Pandangan Karl Marx yang demikian itu menurut Ralf Dahrendorf mengalami pergeseran karena pada abad ke­-20 ternyata telah terjadi pemisahan antara pemilihan dengan pengendalian sarana­-sarana produksi. Di samping itu juga pada akhir abad ke­-19 telah menunjukkan adanya suatu pertanda bahwa para pekerja bukan lagi merupakan suatu kelompok yang dianggap sama dan bersifat tunggal karena pada masa tersebut telah muncul para pekerja dengan status yang berbeda dan jelas, dalam arti ada kelompok pekerja tingkat atas dan ada kelompok tingkat bawah.

Hal yang semacam ini merupakan suatu kenyataan yang sama sekali di luar pemikiran Karl Marx. Kecuali itu, menurut Ralf Dahrendorf, Karl Marx sama sekali tidak membayangkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya akan muncul serikat buruh dengan segenap mobilitas sosialnya. Dengan adanya serikat buruh, serta mobilitas sosialnya maka pengertian akan terjadinya revolusi yang dilakukan oleh kaum buruh dapat dihindarkan. Adapun sebagai alasan mengapa revolusi buruh sebagaimana dikatakan Karl Marx tidak akan terjadi karena dengan adanya serikat buruh dan mobilitas sosialnya maka konflik­-konflik yang mungkin terjadi di antara buruh dan majikan telah diselesaikan dengan sistem pengaturan atau institusionalisasi.

Apabila pembagian kekuasaan dan wewenang tidak merata akan menentukan adanya konflik sosial. Dengan adanya perbedaan wewenang, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai macam posisi. Perlu diketahui bahwa kekuasaan dan wewenang selalu akan menentukan adanya posisi di atas dan posisi di bawah. Dengan adanya kekuasaan maka secara jelas akan memisahkan antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai, dan hal tersebut akan menimbulkan adanya konflik.

Adanya pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai menunjukkan bahwa dalam masyarakatmengandung suatu kepentingan yang berbeda bahkan yang bertentangan. Hal tersebut karena mereka yang berkuasa mempunyai suatu kecenderungan mempertahankan kekuasaannya (status quo), sementara mereka yang dikuasai mempunyai kecenderungan menentang terhadap mereka yang mempunyai kekuasaan.

Dahrendorf membagi kepentingan kelas objektif yang ditentukan secara struktural, yaitu (1) kepentingan *manifest*, ialah kepentingan kelas yang disadari individu untuk dicapai sebagai tujuan, dan (2) kepentingan *latent* (*latent interest*) ialah kepentingan kelas yang tidak disadari oleh individu. Selanjutnya, bertolak dari pengertian tersebut di atas maka dalam setiap sistemsosial yang harus dikoordinasi itu terkandung di dalamnya kepentingan *latent* yang sama yang disebut kelompok semu (*quasi­ group*) yang mencakup baik kelompok yang menguasai maupun kelompok yang dikuasai.

Apabila kelompok semu tersebut mempunyai kesadaran dan mewujudkannya dalam suatu kegiatan untuk kepentingan bersama maka akhirnya akan memunculkan suatu kelompok lain yang disebut kelompok kepentingan. Oleh karenanya, lahirnya kelompok kepentingan itu bersumber dari kelompok semu. Hal ini dapat terjadi karena meskipun kelompok semu itu tidak mempunyai hubungan­-hubungan sosial yang disadari, akan tetapi para anggotanya mempunyai kepentingan­-kepentingan dan tindakan yang sama. Namun demikian, tidak semua individu dalam kelompok semu yang sama akan membentuk suatu organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama.